# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Tinjauan Literatur

Pada saat penyusunan sebuah tulisan penelitian karya tulis berupa skripsi, hal-hal di dalamnya tidak ada yang orisinil dihasilkan oleh seorang penulis. Bagian tinjauan literatur ini memuat literatur-literatur yang memiliki korelasi terhadap pembahasan dan permasalahan penelitian yang diteliti.

Literatur pertama yang digunakan ialah jurnal Asep Setiawan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang berjudul “**Peran Diplomasi Multilateral Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid 19**”. Jurnal ini berisi tentang pentingnya peran Diplomasi Multilateral dalam penanganan pandemic Covid-19, pada tahun 2020, pandemic Covid-19 melandan, isu yang paling disorot adalah kesehatan global. Indonesia memiliki kepentingan nasional yang mengacu pada partisipasi dalam menjaga perdamaian dunia. Indonesia memiliki prinsip dalam diplomasi kesehatan, pada tahun 2018 Indonesia mengatakan, strategi kesehatan global Indonesida ialah menciptakan kesehatan bagi seluruh masyarakat di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. *Health for all*  merupakan strategi Indonesia yang didasarkan pada *Generale Programe of Work 13 World Health Organization* dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

PBB menjadi forum pertama Indonesia dalam kerjasama multilateral yang digunakan untuk mempromosikan pengelolaan kesehatan global untuk kesehatan yang baik untuk semua. Di tingkat regional, Indonesia juga bergantung pada diplomasi tingkat multilateral. Diplomasi Indonesia untuk mempromosikan kerja sama berlangsung di Konferensi ASEAN. Pada pertemuan ke -25 Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) pada bulan April 2020, para menteri luar negeri membuat empat poin penting. Pertama, Indonesia akan memfasilitasi implementasi pertemuan menteri kesehatan ASEAN dan hasil +3 ASEAN. Kedua, Indonesia mengajukan proposal bahwa rantai pasokan dan perjanjian aliran komoditas harus dibahas di Forum KTT ASEAN+3 selama wabah. Ketiga, Indonesia menekankan pentingnya ASEAN dalam melindungi warganya ASEAN, termasuk pekerja migran, mengingat protokol kesehatan yang berlaku. Keempat, Indonesia mengusulkan untuk memungut dana respons COVID-19 ASEAN yang berasal dari Dana Pembangunan ASEAN untuk mendanai pembelian peralatan medis dan kebutuhan lainnya.

Upaya diplomatik oleh Indonesia ini sangat penting mengingat tiga restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia yang diumumkan pada Maret 2020. Pertama, memperkuat upaya untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI). Kedua, kami mendukung upaya untuk mengatasi pandemi baik dalam hal aspek kesehatan dan sosial-ekonomi, dan ketiga, Indonesia terus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia.

Di tahun 2021, Indonesia telah menegaskan kembali lima prioritas diplomatiknya. Yang pertama adalah membangun kemandirian dan ketahanan nasional dalam asuransi kesehatan medis atau nasional. Kedua, mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau. Ketiga, memperkuat sistem perlindungan sipil Indonesia. Keempat, kami akan terus berkontribusi pada resolusi berbagai masalah regional dan global. Kelima, fokus pada menjaga kedaulatan dan integritas Republik Persatuan Indonesia, memperkuat negosiasi perbatasan darat dan perbatasan, dan meningkatkan upaya untuk melindungi integritas dan kedaulatan Indonesia.

Literature review yang kedua ialah jurnal berjudul *Health Diplomacy in Pandemical Times*, ditulis oleh Tanisha M. Fazal. Jurnal ini berisi tentang sejarah diplomasi kesehatan, beberapa literatur yang ada tentang diplomasi kesehatan menunjukan dua perbedaan yang mungkin ingin dicapai oleh para aktor hubungan internasional. Yang pertama mengacu pada tujuan dari kesehatan masyarakat global itu sendiri dan di sisi lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Yang kedua mengacu pada sarana kesehatan, terutama kerjasama yang dilakukan secara multilateral dengan lingkup global, secara regional maupun bilateral yang menjadikan tujuan diplomasi kesehatan global sebagai kerjasama “multi-level dan multi-aktor”

Covid-19 terdeteksi untuk pertama pada akhir 2019 di Wuhan. Skala pandemi ini jauh lebih besar daripada pandemi 1918 dan pandemi yang berlangsung lama seperti HIV/AIDS. Organisasi kesehatan dunia *World Health Organization* mendapat banyak komentar terhadap penanganan Covid-19 ini. WHO dituduh tidak berdaya, menggunakan poin pembicaraan dari pemerintah cina yang mengecilkan keseriusan dan tingkat penularan COVID 19, yang pada awalnya memuji china untuk respon terhadap wabah. Hal ini terjadi awalnya karena Cina pernah lambat dalam melaporkan SARS, Arab Saudi lambat melaporkan MERS, Liberia dan Guinea juga lambat melaporkan Ebola pada tahun 2014. WHO tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi kepada negara bagian karena melaporkan kegagalan. Diplomasi kesehatan yang disalurkan melalui WHO telah dipenuhi selama pandemi Covid 19. Dengan kemungkinan pengecualian dari bank dan IMF, yang telah membantu negara-negara berkembang, membuat upaya global dan multilateral lainnya terhenti. G20 mengeluarkan pernyataan yang menyarankan komitmen internasional, tetapi langkah-langkah yang diambil sebagian besar terbatas pada kebijakan domestik. Pandemi saat ini juga ditandai dengan banyaknya masalah kesehatan bilateral diplomasi, yang terkadang mengejutkan negara-negara itu sendiri. Kurangnya kerjasama kesehatan global dalam masa pandemi Covid 19 ini juga membingungkan dan mengganggu karena beberapa alasan:

Pertama, logika menunjukan negara lebih cenderung bekerjasama dalam menghadapi ancaman langsung atau terjadi begitu cepat, yang dimana pemimpin negara seharusnya bisa melihat bahaya langsung sebagai ancaman terhadap negaranya, dan mereka merespons dengan cepat sesuai dengan itu agar tidak terjadi kepanikan massal. Kedua, kerjasama dan koordinasi global diperlukan untuk mengatasi masalah ekonomi di masa pandemi. Mengingat berapa banyak perdagangan internasional yang sangat berkontribusi pada ekonomi global dan perdagangan itu bergantung pada perjalanan barang dan orang-orang dunia harus menerima konsekuensi ekonomi global yang parah atau mencari cara untuk membuat perjalanan yang aman dan memungkinkan dalam jangka pendek. Ketiga, prediksi kesehatan masyarakat menunjukan pandemi akan lebih banyak, jika negara tidak dapat atau tidak belajar bagaimana bekerja sama secara lebih luas.

Literature reviu yang ketiga yang digunakan penulis adalah jurnal berjudul “ASEAN Regional Potensials for Combating Covid 19” yang ditulis oleh Rizky Widian dan Vrameswari Omega W dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Parahyangan. Jurnal tersebut memuat mengenai bagaimana ASEAN sebagai organisasi tingkat regional mewujudkan kerjasama dan komitmen negara-negara dalam Kawasan ASEAN dalam menghadapi tantangan regional di dalam kondisi pandemi yang melanda.

Semua negara di dunia ini dalam menghadapi wabah harus tetap melanjutkan upaya kerjasama mereka. Wabah yang terjadi ini menjadi masalah keamanan yang harus segera diselesaikan. Wabah pandemi Covid 19 ini muncul sebagai ancaman yang serius, meskipun bukan bersifat tradisional seperti ancaman militer terhadap sebuah negara. Beberapa kasus wabah nontradisional ini pernah terjadi juga dalam sejarah umat manusia, contohnya dalam wabah Black Death dan Spanish Flu yang menimbulkan jutaan korban jiwa saat itu. Kasus-kasus penyakit seperti SARS, MERS, dan H5N1 juga pernah melanda dunia. Pada tahun 2014 dunia digemparkan dengan virus Ebola yang melanda Afrika. Pada saat itu anggota Uni Afrika bekerja sama untuk menangani Virus Ebola yang menyebar di wilayah Afrika. Uni Afrika bekerja sama dengan organisasi local, Uni Eropa, Bank Dunia, dan juga komunitas-komunitas di negaranya untuk berkontribusi terhadap upaya memulihkan keadaan dan sementara untuk tanggap darurat terus dilakukan untuk mengatasi wabah yang terjadi pada tahun 2014 itu. Dengan begitu hal ini dapat dijadikan bukti bahwa pengaturan regional bisa dijadikan solusi untuk menghadapi suatu wabah. ASEAN sebagai badan asosiasi regional Asia Tenggara sudah melakukan beberapa upaya untuk menangani pandemi Covid 19 ini contohnya, Menteri pertahanan ASEAN pada tahun 2020 melakukan pertemuan di Ha Noi yang menghasilkan pernyataan tentang kerjasama pertahanan melawan wabah penyakit. Pada tahun yang sama juga Menteri ekonomi ASEAN berkumpul di Da Nang Vietnam untuk membuat pernyataan dan membulatkan tekad bersama untuk terus berjanji untuk tetap terbukanya pasar ASEAN guna mengurangi dampak pandemic Covid-19.

KTT khusus ASEAN juga diselenggarakan melalui konferensi video yang menghasilkan deklarasi KTT ASEAN yang khusus tentang wabah penyakit covid 19. Selanjutnya, pemimpin negara Kawasan ASEAN setuju mengenai pembentukan ASEAN Covid 19 Response Fund dalam rangka pengamanan ketersedian dan alat-alat medis di regional Asia Tenggara. KTT khusus ASEAN mengenai wabah Covid 19 ini menjadi sangat penting sebagai modal dan potensi upaya regional. Ini menjadi bayangan komitmen untuk negara-negara di kawasan ASEAN untuk mengatasi masalah bersama tanpa mengorbankan kepentingan yang lain. Sudah menjadi tugasnya negara berkepentingan untuk memberikan rasa aman untuk rakyatnya dan juga menjaga perekonomian nasional mereka agar tidak terpuruk, hal itulah yang menjadikan kerjasama dan koordinasi regional sangat penting.

Robert Jervis menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat kerjasama internasional menjadi lebih mungkin. Yang pertama, peluang kerjasama akan meningkat jika ada sesuatu yang meningkatkan insentif untuk bekerjasama. Kedua, ada yang menurunkan insentif untuk saling mengeksploitasi yang membuat kerjasama itu menjadi mahal. Yang ketiga ada yang meningkatkan harapan negara-negara bahwa mereka dapat bekerjasama. Faktor-faktor ini sesuai dengan kondisi ASEAN dan dapat menjadi cerminan potensi organisasi untuk mengatasi masalah dengan cara yang kooperatif dan koordinatif.

Meski kerjasama sangatlah penting, akan tetapi fokus utama anggota ASEAN tetaplah harus pada upaya regional. Menurut Kenneth Oye, semakin banyak jumlah aktor yang terlibat dalam kerjasama, semakin banyak resiko yang akan dihadapi negara dalam kerjasama itu sendiri. Tetapi apabila semakin sedikit jumlah aktor yang terlibat dalam kerjasama, umumnya akan meningkatkan kemungkinan kerjasama. Dengan begitu ASEAN harus menjadikan upaya regional sebagai prioritas karena akan lebih layak untuk kebutuhan tindakan kerjasama dalam mengatasi masalah pandemi covid 19. Dengan jumlah anggota ASEAN yang lebih sedikit dibanding komunitas global pada umumnya, hal ini harusnya akan meningkatkan peluang kerjasama regional secara lebih efisien tanpa meninggalkan upaya kerjasama secara global.

Literatur review keempat dengan jurnal yang berjudul “Peningkatan Kerjasama Multilateral dan Bilateral Melalui Diplomasi Kesehatan Mengenai
Penanggulangan Vaksin Covid-19 di Indonesia” yang ditulis oleh Erna Kurniawati dari UPN Jawa Timur. Jurnal ini berisi tentang bagaimana Diplomasi kesehatan dalam upaya kerjasama internasional Indonesia terhadap menanggulangi Covid-19. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia melalui dua jalur yakni melalui Multilateral dan Bilateral. Kerjasama multilateral yang dilakukan ialah melalui COVAX dan kerjasama bilateral untuk memperoleh saluran ke sumber daya adalah dua strategi penting. Selain itu, pemerintah Indonesia telah berhasil memperkenalkan kembali nasionalisme vaksin dan memperluasnya melalui vaksin multilateralisme. Kedua strategi diplomatik dapat menjadi fondasi baru untuk diplomasi kesehatan Indonesia selama konferensi Covid-19. Dalam jangka panjang, identifikasi krisis ini akan berkontribusi pada upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat diplomasi kesehatan dan meningkatkan posisi Indonesia di sektor kesehatan global.

Literature review kelima dengan jurnal yang berjudul “Aktivitas Diplomasi Kesehatan Indonesia-Tiongkok di Masa Pandemi COVID-19” yang ditulis oleh Valerie Tania Margono dkk dari Faculty of Social and Political Science, Universitas Katolik Parahyangan. Jurnal ini memberikan diskusi komprehensif tentang latar belakang implementasi diplomasi kesehatan. Diplomasi kesehatan adalah bentuk diplomasi yang saat ini dipraktikkan, tetapi keberadaan pandemi Covid-19 telah menggunakan diplomasi kesehatan yang digunakan kembali. Seperti Indonesia dan Cina kemudian, kedua negara telah memperkenalkan ijazah kesehatan. Indonesia dan Thailand telah menjadikan diplomasi kesehatan sebagai prioritas pada agenda nasional mereka, memicu kegembiraan dan konsekuensi yang tak terduga. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membahas kegiatan diplomatik kesehatan Indonesia dan Cina selama konferensi COVID-19 menggunakan konsep diplomasi kesehatan. Berdasarkan penelitian ini termasuk penelitian tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Indonesia dalam meningkatkan standar kesehatan masyarakat di berbagai negara dan diplomasi kesehatan dengan Cina.

**Tabel 2. 1 Tinjauan Literature**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul** | **Penulis** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
| 1 | Peran Diplomasi Multilateral Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 | Asep Setiawan | Literatur dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai Diplomasi Indonesia dalam menghadapi pandemic Covid-19 | Pembahasan tidak hanya terfokus pada Diplomasi Kesehatan saja |
| **2** | *Health Diplomacy in Pandemical Times*  | Tanisha M. Fazal | Persamaan penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai Diplomasi di masa Pandemi | Fokus pembahasan tidak hanya membahas Pandemi Covid-19 |
| **3** | *ASEAN Regional Potensials for Combating Covid-19* | Rizky Widian dan Vrameswari Omega W | Membahas mengenai bagaimana ASEAN sebagai Organisasi tingkat Regional mewujudkan Kerjasama di kawasan ASEAN dalam menghadapi Pandemi Covid-19 | Pembahasan tidak hanya membahas Negara Indonesia saja, melainkan ASEAN sebagai Organisasi Regional |
| 4. | Peningkatan Kerjasama Multilateral danBilateral Melalui Diplomasi Kesehatan MengenaiPenanggulangan Vaksin Covid-19di Indonesia | Erna Kurniawati | Membahas mengenai pentingnya kerjasama multilateral dan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia  | Pembahasan hanya berfokus pada kerjasama pengadaan vaksin melalui fasilitas COVAX |
| 5. | Aktivitas Diplomasi Kesehatan Indonesia-Tiongkok di Masa Pandemi COVID-19 | Margono, Tania Valeria dkk | Membahas tentang diplomasi kesehatan yang dilakukan Indonesia dari sudut pandang analisis SWOT  | Bahasan lebih banyak melalui pendekatan studi kasus Indonesia-Tiongkok |

## 2.2 Kerangka Teoritis

Dalam penyusunan penelitian ini, dibutuhkan kerangka berpikir yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Kerangka kerja konseptual ini dimaksudkan untuk membantu menganalisis dan memahami masalah yang didukung oleh para ahli dan teori ahli yang dapat memberikan hasil yang mapan secara ilmiah dan akademis.

Kerangka teori berfungsi sebagai sumber dan dasar, atau referensi, untuk menganalisis masalah yang diteliti. Dalam bentuk konsep teoritis dan pernyataan para ahli atau otoritas tertentu yang memiliki otoritas dan pemahaman yang luas tentang masalah yang diteliti, ini penting sebagai referensi untuk masalah yang diteliti. Studi ini berkaitan dengan kerangka kerja konseptual yang berkaitan dengan kerja sama atau negosiasi antar negara.

### 2.2.1 Teori Neoliberalisme

Neoliberalisme adalah ideologi politik dan ekonomi yang muncul dan dicirikan oleh penekanan kuat pada kapitalisme pasar bebas dan kebebasan individu. Ini didasarkan pada gagasan bahwa pasar lebih efisien dan efektif daripada intervensi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dan menyediakan barang dan jasa.

 Salah satu tokoh kunci dalam perkembangan neoliberalisme adalah ekonom Milton Friedman, yang berpendapat bahwa pasar bebas adalah aturan yang sangat efektif untuk mendistribusikan sumber dyaya dan bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian seringkali kontraproduktif. Gagasan Friedman berpengaruh dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Reagan dan Thatcher pada 1980-an.

 Kebijakan neoliberal telah dikaitkan dengan deregulasi, privatisasi, dan langkah-langkah penghematan. Kebijakan ini telah dikritik karena memperparah ketimpangan dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Kritikus berpendapat bahwa neoliberalisme memprioritaskan kepentingan korporasi dan orang kaya di atas kepentingan masyarakat umum, dan hal itu telah menyebabkan erosi jaring pengaman sosial dan penurunan layanan publik. Mereka juga berpendapat bahwa kebijakan neoliberal telah berkontribusi pada krisis keuangan global tahun 2008 dan penurunan ekonomi selanjutnya. Pendukung neoliberalisme, di sisi lain, berpendapat bahwa ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi, dan ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Secara keseluruhan, neoliberalisme tetap menjadi topik yang kontroversial dan diperdebatkan baik di kalangan akademis maupun politik.

### 2.2.2 Pandemi

 Pandemi adalah wabah penyakit yang meluas yang dihasilkan dari penularan infeksi orang-ke-orang. Secara historis, banyak wabah penyakit dan pandemi telah didokumentasikan (WHO, 2011). Misalnya: Sindrom paru hantavirus, sindrom pernapasan akut parah, H5N1 influenza, H1N1 influenza, sindrom pernapasan Timur Tengah, Ebola (Eric A. Friedman, 2015). Meskipun istilah "pandemi" tidak didefinisikan dalam banyak teks medis, pandemi memiliki beberapa karakteristik penting, seperti penyebaran geografis yang meluas, penyebaran penyakit, keparahan, insiden tinggi, kekebalan, dan penularan. ada. Krisis terkait pandemi ini memiliki efek buruk pada ekonomi, masyarakat, keamanan nasional, kesehatan, dan komunitas internasional. Pandemi juga telah menyebabkan keresahan politik yang signifikan.

Pandemi itu sendiri berasal dari kata *theorigenites* dan bahasa Yunani yaitu pan “semua” dan demos “rakyat”. Istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan epidemi penyakit menular yang menyebar secara bersamaan di seluruh negara atau benua (Honigsbaum, 2009). Namun, dalam 20 tahun terakhir istilah ini belum ditentukan dalam banyak teks medis modern. Sebagai contoh, definisi pandemi yang diterima secara internasional yang diberikan dalam Kamus Epidemiologi adalah epidemi yang terjadi di area yang sangat besar di seluruh dunia atau melintasi perbatasan nasional dan biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang (Harris 2001). Definisi istilah pandemi sangat luas sehingga dapat dikatakan terjadi setiap tahun di semua wilayah iklim perantara belahan bumi selatan dan utara. Ini menyebar secara musiman di seluruh perbatasan dan mempengaruhi banyak masyarakat. Namun, epidemi musiman ini tidak dianggap sebagai pandemi.

Sejarah manusia memiliki banyak pandemi besar seperti cacar, kolera, wabah, demam berdarah, AIDS, influenza, sindrom pernapasan akut parah (SARS), penyakit Nil Barat, dan TBC. Pandemi influenza tidak dapat diprediksi, tetapi peristiwa berulang dapat memiliki konsekuensi serius bagi masyarakat internasional. Pandemi influenza telah terjadi sejak tahun 1500-an ia sekitar tiga kali satu abad, yaitu sekitar 10-50 tahun. Ada tiga pandemi influenza di abad ke -20, yang disebut "Influenza Spanyol" dari tahun 1928 hingga 1919, "Influenza Asia" dari tahun 1957 hingga 1958, dan "Flu Kong Hong" dari 1968 hingga 1969. (WHO, 2011). Semua pandemi membahayakan kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, pandemi flu Spanyol tahun 1918-1919 menewaskan lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia, menjadikannya epidemi paling mematikan dalam sejarah (WHO, 2011b). Virus influenza H1N1 2009 adalah pandemi influenza pertama abad ke -21. Pandemi telah mempengaruhi seluruh dunia dan menyebabkan lebih dari 18.000 kematian (Suresh Rwar, 2016).

### 2.2.3 Kebijakan Pandemi

 Protokol darurat kesehatan yang paling kuat dan sistem jaminan sosial untuk menangani wabah global adalah kesiapan. Ini ditandai dengan keberadaan darurat, dalam hal ini komprehensif dalam hal bahaya kesehatan atau sosial. Jika protokol ini gagal, Panangs yang serupa pasti akan mengikuti jika terjadi krisis di masa depan. Namun, sementara protokol di atas baru saja mendapat masalah, pemerintah memang memiliki beberapa pilihan untuk menangani krisis jika situasi kacau muncul. Tetapi jika Anda memikirkannya, Anda dapat melihat bahwa strategi penolakan menenangkan komunitas tidak lagi efektif. Reputasi dan kredibilitas pemerintah lebih merupakan masalah pembuatan kebijakan daripada tidak panik. Respons krisis yang ideal tidak hanya mencakup tindakan multifaset khusus sektor, tetapi juga langkah-langkah adaptasi untuk menanggapi berbagai guncangan eksternal atau lokal (Wardhana, 2020).

 Insiden wabah pandemi COVID-19 kali ini membuat orang belajar dan berlatih bekerja dari rumah, atau WFH singkatnya, dan belajar dan berlatih belajar dari rumah, atau SFH singkatnya. Kecepatan di mana prinsip -prinsip WFH diterapkan menyebabkan perubahan dan gangguan di seluruh proses bisnis dan tempat kerja. Meskipun jelas bahwa tidak semua industri akan dapat melakukan WFH -nya karena sifat bisnis mereka, potensi untuk melakukannya akan semakin memperkuat upaya mereka untuk melakukannya. Alasan utamanya adalah hambatan teknis, kurangnya kepercayaan pada tempat kerja dan kurangnya kontrol atas proses kerja. Pada akhirnya, penyesuaian sekarang dilakukan untuk kembali ke tradisi pra-pandemi di masa lalu. Atau, kami memilih untuk merangkul normal baru sebagai lingkungan yang berubah dengan cepat. Lebih penting lagi, ada kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas yang semakin menghapus dan mempertahankan atau mendapatkan kembali momentum selama periode kerja pasca-korona-dari-rumah. Ledakan itu juga merupakan pengingat fitur yang lebih besar di masa depan (kerentanan, ketidakpastian, kompleksitas, ambiguitas) dan ketidakpastian kejutan (sering disebut angsa hitam). Dan seterusnya, produk dari berbagai industri jangka panjang, jangka menengah dan bahkan rencana tahunan dapat menjadi tidak relevan karena guncangan. Akibatnya, menjadi semakin penting bahwa segala sesuatu yang terkait dengan rencana tersebut adalah dokumen yang mengikat secara hukum dan finansial.

### 2.2.4 Health Diplomacy

Menurut Fidler (Fidler, 2010), masalah kesehatan telah mendapat perhatian lebih yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam negosiasi kebijakan global selama dua dekade terakhir. Saat ini, diplomasi kesehatan dianggap sangat penting dibanding dengan sebelumnya. Kesehatan global telah berkembang menjadi bidang studi yang berbeda dari kesehatan internasional.

Istilah “diplomasi” sendiri memiliki makna yang panjang, makna modernnya dipopulerkan oleh Edmund Burke pada tahun 1769. Sederhananya, hal ini mengacu kepada negosiasi antara pejabat dari berbagai negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka yang berbeda tanpa harus melakukan perang (Kickbusch I. , 2012). Dalam prakteknya diplomasi dapat menggunakan *hard power,* *soft power* dan gabungan dari keduanya *smart power*, menggunakan berbagai modalitas dan aktor untuk mencapai kebijakan luar negeri (Thomas E Novoty, 2013). Penggabungan konsep dalam kesehatan dan diplomasi global didefinisikan sebagai negosiasi multi-level, multi-aktor yang menghasilkan istilah baru dan membentuk kebijakan kesehatan global (Kickbusch IS, 2007). Ini termasuk berbagai proses di mana negara bagian, lembaga pemerintah, dan aktor non-negara menegosiasikan tanggapan terhadap tantangan kesehatan (Kelley Lee, 2011). Jika meningkatkan kesehatan adalah tujuan utama politik, ini termasuk konsep mekanisme kesehatan dalam membentuk kebijakan dan strategi negosiasi untuk mencapai tujuan politik, ekonomi dan sosial lainnya. dan kesehatan adalah kendaraan untuk tujuan kebijakan luar negeri lainnya.

Jika dilihat dari sejarah, fokus negosiasi antar negara, termasuk didalamnya kesepakatan internasional tentang kesehatan adalah pada keamanan dan perdagangan. Akan tetapi dalam beberapa dekade terakhir, negosiasi tersebut telah meluas ke hak asasi manusia, konflik,lingkungan, dan kesehatan. Di saat yang sama telah terjadi perluasan dan penerapan ke hukum global untuk mengatasi masalah kesehatan global (Kickbusch I. , 2012). Masalah kesehatan telah lama dinegosiasikan dibawah naungan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), akan tetapi seiring berjalannya waktu hal ini diperluas dengan melibatkan beberapa forum multilateral lain termasuk PBB dan WTO serta lainnya yang secara tradisional tidak terfokus pada isu kesehatan. Sebagai entitas yang normati, WHO menetapkan standar dan norma global misalnya, perjanjian internasional, peraturan, konvensi dan rekomendasi. WHO juga memimpin dan mengkoordinasi penelitian global, serta menjadi suara yang kuat dalam perdebatan tentang Kesehatan.

Diplomasi kesehatan adalah metode komunikasi pilihan bagi pemangku kepentingan kebijakan kesehatan dan kesehatan masyarakat untuk bekerja bersama, menyelesaikan konflik, meningkatkan sistem perawatan kesehatan, dan melindungi hak -hak kesehatan komunitas mereka. Diplomasi kesehatan juga dipahami sebagai metode interaksi yang melibatkan berbagai tujuan, masalah kesehatan dan non-kesehatan. (Vincanne Adams, 2008), diplomasi kesehatan ini mencapai berbagai tujuan untuk meningkatkan kesehatan global sambil mempertahankan dan memperkuat hubungan internasional di luar negeri, terutama dalam pengaturan yang terkena dampak konflik dan miskin sumber daya. Dianggap sebagai aktivitas perubahan kebijakan terhadap diplomasi kesehatan dapat bilateral atau multilateral, melibatkan aktor negara atau non-negara, dan memiliki banyak tujuan. Dalam hal ini, ini didasarkan pada pemahaman teoretis dan ganda, tetapi tidak terbatas pada peningkatan kesehatan masyarakat dan memajukan agenda kebijakan asing dan keamanan. Peristiwa global telah menunjukkan bahwa kepentingan relatif aktor, proses dan tujuan tidak dapat diterima sebagaimana adanya dan harus dinilai secara khusus dalam situasi tertentu. Negara -negara membangun niat baik dan kekuatan lunak dengan menilai urgensi tujuan yang berbeda dan cara terbaik untuk mencapainya melalui diplomasi kesehatan, dan menggunakan diplomasi kesehatan untuk mencapai tujuan kemanusiaan selama pandemi. Anda juga dapat menggunakan negara ini menganggap struktur kerja sama kelembagaan yang ada cukup untuk memenuhi sebagian kebutuhannya selama pandemi. Jika suatu negara menarik diri dari komunitas kesehatan global untuk menangani pandemi, mungkin ada konsekuensi yang mempengaruhi kemampuan komunitas kesehatan global untuk menangani pandemi di masa depan. Krisis Covid-19 yang kami hadapi saat ini adalah pengingat bahwa ada negara-negara dengan kerja sama internasional yang dapat memperkuat mereka dalam mengembangkan vaksin terhadap Covid-19, hal ini juga berlaku untuk Indonesia.

### 2.2.5 Teori Diplomasi

Teori diplomasi merupakan praktik dalam mengelola hubungan antar negara yang dilakukan oleh perwakilan resmi. Diplomasi sangat penting dalam hubungan internasional karena memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan nilainya dengan cara bernegosiasi dengan negara lain secara lebih formal. Tujuan diplomasi untuk negara manapun adalah untuk memperkuat kebijakan luar negeri dan kedaulatan nasionalnya. Untuk itu, perlu untuk memperkuat hubungan dengan negara -negara tetangga, menjaga hubungan dengan negara -negara yang jauh, dan memastikan stabilitas nasional. Teori diplomasi didasarkan pada berbagai bidang seperti ilmu politik, hubungan internasional, sejarah, hukum, ekonomi dan psikologi. Konsep kunci dalam teori diplomasi termasuk negosiasi, komunikasi, kepercayaan, kekuatan, aliansi, dan resolusi konflik.

Salah satu tujuan utama dari teori diplomasi adalah untuk mengidentifikasi kondisi dan strategi yang mengarah pada keberhasilan negosiasi diplomasi. Diplomasi yang sukses seringkali bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan kepentingan yang bersaing, membangun kepercayaan, dan menemukan solusi kreatif untuk masalah yang kompleks.

Aspek penting lainnya dari teori diplomasi adalah peran diplomasi dalam membentuk norma dan institusi internasional. Diplomasi dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum, dan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, terorisme, dan pandemi.

### 2.2.6 Konsep Kesehatan Anggota ASEAN

Negara-negara anggota ASEAN mengadopsi kebijakan kesehatan dengan mengeluarkan pernyataan bersama tentang penerapan standar kesehatan negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, aplikasi layanan kesehatan di setiap negara akan menggunakan instrumen yang sama dengan paspor. Ini, menurut G-20, mirip dengan gagasan bahwa menggunakan aplikasi peduli dapat mencegah interkoneksi aplikasi lain. Indonesia, di sisi lain, ingin mengembangkan protokol standar layanan kesehatan yang diterima oleh semua negara dan diawasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang pada gilirannya akan memfasilitasi perjalanan ke negara mana pun. Negara-negara Anggota ASEAN hampir menyelesaikan sertifikasi COVID-19 sebagai hasil dari upaya strategis dan kolaboratif jangka panjang dari pandemi COVID-19. Hal ini tertuang dalam ASEAN Health Ministerial Meeting ke-15.

Pengumuman penyelesaian sertifikasi COVID-19 di seluruh negara ASEAN merupakan inisiatif Indonesia sebagai Ketua AHMM ke-15. Dengan selesainya sertifikasi COVID-19 di seluruh negara anggota ASEAN, diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan mobilitas antar negara anggota ASEAN di tengah penerapan protokol kesehatan global yang sedang berlangsung. Deklarasi ini turut menjadikan Peduli Lindungi sertifikat internasional Indonesia diakui di seluruh negara kawasan ASEAN. Selama AHMM ke-15, para pemimpin layanan kesehatan dari negara-negara anggota ASEAN membahas pentingnya verifikasi dan sertifikasi universal di seluruh kawasan. Dengan tambahan sistem verifikasi universal untuk negara anggota ASEAN, proses verifikasi akan lebih aman dan mudah diselesaikan. Menanggapi kebutuhan tersebut, Indonesia sedang mengembangkan aplikasi web sebagai mekanisme verifikasi dan sertifikasi universal untuk negara-negara anggota ASEAN.

**2.2.7 *Rational Choice Theory* (RCT)**

 Teori ini bermula dari kebutuhan manusia dan perilakunya yang cenderung serakah. Manusia merupakan makhluk sosial sendiri mempunyai kuasa akal dan pikiran untuk melakukan suatu perbuatan maupun tindakan. Manusia adalah makhluk rasional sehingga segala macam tindakannya berdasarkan atas keuntungan sebesar-besarnya dan tergantung pada keuntungan pribadi saja. Teori ini merupakan gabungan dari utilitarianisme, kontrak sosial dan sifat manusia yang sebagian besar dan tidak dapat diubah. *Rational Choice Theory* dekat dengan pendekatan metodologi individualisme aksi sosial yang dilakukan hanya demi kepentingan sangat bermanfaat.

Diplomasi kesehatan ini bisa dipahami sebagai metode diplomati atau penyusunan kebijakan oleh actor negara maupun non-negara. Dengan kata lain, diplomasi kesehatan diartikan menjadi upaya kolaboratif guna mencapai kesehatan dalam tingkat yang lebih besar baik secara Kawasan maupun global. Jenis diplomasi kesehatan ini seringkali berprinsip bahwa semua pihak yang terlibat memiliki masalah kesehatan dan memiliki tujuan yang sama untuk mencapai diplomasi kesehatan. Diplomasi Kesehatan dapat digunakan untuk dua tujuan utama yang berbeda. Tujuan pertama adalah mengatasi masalah kesehatan yang terus menerus dan tujuan kedua adalah mewujudkan kepentingan nasional yang tidak terkait dengan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kedua berarti menggunakan masalah kesehatan sebagai alat. Banyak peneliti juga menekankan tujuan kedua, yaitu agar negara selalu memiliki niat ketika melakukan diplomasi kesehatan yang tidak terkait dengan bidang medis.

Sama dengan upaya diplomasi yang telah ditentukan lainnya, tujuan diplomasi kesehatan sering dimanfaatkan oleh partai politik tertentu merupakan konsekuensi dari kepentingan domestik atau nasional para pihak. Dalam *Rational Choice Theory* di sisi lain menjelaskan pengambilan keputusan politik yang berharap dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian.

**2.2.8 Konsep Soft Power**

Soft power, sebuah konsep yang dikemukakan oleh ilmuwan politik Joseph Nye, mengacu pada kemampuan negara dan aktor untuk mempengaruhi orang lain melalui persuasi, bujukan, dan kerja sama, bukan paksaan atau kekerasan. Soft power berasal dari daya tarik budaya, nilai, institusi, dan kemampuan suatu negara untuk membangun hubungan dan jaringan pengaruh dengan negara lain.

Soft power bukanlah kekuatan militer atau kekuatan ekonomi, melainkan kekuatan yang bertindak secara tidak langsung dengan menarik dan membujuk orang. Ini dapat digunakan untuk memajukan kepentingan suatu negara dalam berbagai cara, termasuk mempromosikan budaya dan nilai-nilainya, memberikan bantuan pembangunan, dan membangun aliansi dan kemitraan dengan negara lain.

Salah satu manfaat utama soft power adalah membantu membangun kepercayaan dan kerja sama antar negara. Hal ini penting dalam mengatasi tantangan global yang kompleks seperti perubahan iklim, terorisme, dan pandemi. Soft power juga membantu meningkatkan prestise dan legitimasi suatu negara, yang sangat penting dalam mempertahankan pengaruh dan dukungan internasional.

Contoh soft power termasuk daya tarik global budaya populer Amerika, penggunaan diplomasi budaya untuk mempromosikan nilai-nilai dan budaya nasional, dan penyediaan bantuan pembangunan dan kemanusiaan ke negara lain. Soft power juga dapat digunakan oleh aktor non-negara seperti LSM, bisnis, dan organisasi internasional.

Secara keseluruhan, konsep soft power menekankan peran daya tarik dan persuasi dalam hubungan internasional dan pentingnya memahami bagaimana negara dapat menggunakan cara non-koersif untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya.

**2.2.9 *Global Governance***

 Pemerintahan global, sering dikenal sebagai “hukum dunia”, memiliki sistem hukum global di seluruh dunia. Kegiatan atau proyek yang dilakukan oleh individu, organisasi internasional, atau bahkan tim untuk mencapai tujuan tertentu di arena internasional. Tata Kelola Global merupakan aspek penting bagi setiap bangsa karena jika suatu bangsa berada dalam situasi di mana ia harus menghadapi permasalahan yang berada jauh dari jangkauaannya. Globalisasi memungkinkan munculnya ide-ide dan tren untuk bergerak maju. Hal ini menimbulkan berbagai keberatan dari organisasi sektor swasta maupun organisasi masyarakat yang terpinggirkan. Untuk berkontribusi pada diskusi banyak masalah, termasuk kesehatan. Akhirnya, hal ini menyebabkan sistem perawatan kesehatan global menjadi lebih beragam dan inklusif, tidak lagi berada di bawah kendali pemerintah nasional dan organisasi internasional.

## 2.3 Asumsi

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah, penulis berasumsi:

“Bahwa strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 yaitu implementasi diplomasi kesehatan Indonesia, PBB menjadi yang pertama kali digunakan untuk mendorong kebijakan kesehatan global untuk membawa kesehatan bagi semua. Pada tingkat kawasan, diplomasi multilateral dipilih Indonesia dalam melakukan kerjasama, hal ini dilakukan melalui kerjasama dalam pertemuan ASEAN. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan ASEAN dengan beberapa tujuan yakni pertama, untuk merespons dengan cepat pandemi covid-19 sesuai dengan itu agar tidak terjadi kepanikan massal. Kedua, kerjasama dan koordinasi global diperlukan untuk mengatasi masalah ekonomi di masa pandemi. Untuk mengatasi wabah ini, disepakati bahwa vaksin merupakan upaya terbaik. Pemerintah Indonesia bekerjasama secara multilateral melalui penyediaan vaksin COVAX dan kerjasama bilateral dalam rangka mendapatkan akses ke sumber vaksin.

## 2.4 Kerangka Analisis

Pada kerangka analisis, dijelaskan bagaimana cara dalam melakukan penelitian. Hal ini agar memudahkan penelitian untuk mencari dasar permasalahan yang kemudian menjadi pedoman dari permasalahan yang dirumuskan. Peneliti menggunakan konsep diplomasi dalam tulisan skripsi ini.

Dalam tatanan ini, konsep diplomasi dijadikan tolak ukur proses pencapaian kepentingan bangsa Indonesia. Potensi diplomasi Indonesia akan membantu negara dan dirinya sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19

Gambar kerangka analisis dirincikan seperti:



**Gambar 2. 1 Kerangka Analisis**